



Seorang jurnalis Palestina mengalami serangan dari sejumlah warga Israel yang menyerbu kompleks Al-Aqsa di Yerusalem saat mengikuti 'pawai bendera' pada Rabu (5/6/2024). (Foto: Al Jazeera)

Serbu Kompleks Masjid Al Aqsa

Warga Israel Serang Jurnalis

Yerusalem, MIMBAR - Sejumlah warga Palestina hingga jurnalis terluka diserang warga Israel yang menyerbu kompleks Al Aqsa di Yerusalem, Rabu (5/6). Middle East Eye (MEE) melaporkan warga Israel menyerang toko-toko milik orang Palestina dan mendesak mereka menutup

toko karena warga Israel akan menggalar pawai. Para pemuda juga menyerang beberapa jurnalis seperti jurnalis Haaretz, Nir Hasson, dan jurnalis lepas Palestina, Saif Kwasmir. "Anak-anak muda menyerang warga Palestina yang lebih tua," lapor jurnalis Al Jazeera Imran

Khan. Lebih dari 1.100 warga Israel melakukan "Pawai Bendera" pada Rabu, untuk memperingati insiden penangkapan orang Yahudi di Yerusalem Timur selama perang Arab-Israel 1967.

■ Bersambung ke Hal 11

MUI Dorong OKI Kerahkan Militer ke Jalur Gaza

Jakarta, MIMBAR - Berbagai upaya diplomatik dan tekanan ekonomi telah dilakukan sejumlah negara untuk menghentikan tindakan brutal Israel di Jalur Gaza, tetapi masih belum berhasil. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim dalam sebuah video yang dilihat redaksi pada Kamis (6/6).

Merujuk pada amanah Nabi Muhammad SAW, Sudarnoto menjelaskan bahwa sebuah kemungkinan harus dihentikan dengan tangan atau "kekuasaan" yang dimiliki.

Dia membaginya ke dalam empat bentuk kekuasaan yakni political power, diplomatic power, economical power dan military force. Ketiga kekuatan telah digunakan namun belum membuahkan hasil.

"Two State Solution itu adalah cara yang tepat dan terbaik yang dilakukan tetapi

Israel tidak mau melakukan itu. Sehingga pembunuhan terus dilakukan," ujarnya.

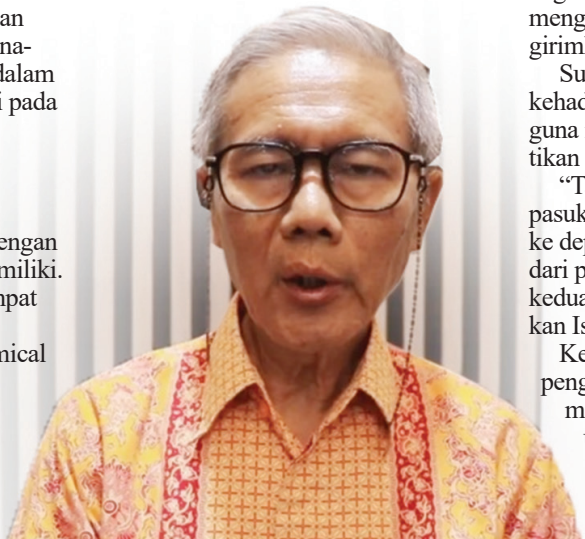
Sementara itu menurut Sudarnoto, cara terakhir yakni upaya militer masih

belum maksimal. Oleh karenanya dia mendorong agar military force bisa dioptimalkan melalui Organisasi Kerjasama Islam. "Saya ingin mengusulkan optimalisasi military force oleh negara-negara OKI, perlu bersepakat mengkonsolidasikan diri untuk mengirim militer ke Gaza," kata dia.

Sudarnoto menekankan pentingnya kehadiran militer OKI di Jalur Gaza guna melindungi warga dan menghentikan kebrutalan Israel.

"Targetnya adalah menghambat pasukan Israel, untuk tidak merangsek ke depan dan melindungi warga Gaza dari pembunuhan brutal. Target yang kedua adalah memukul mundur pasukan Israel dari Gaza," paparnya.

Ketua MUI itu berharap dengan penerahan militer OKI mampu mengantarkan cita-cita Palestina untuk merdeka dan bebas dari pendudukan Israel. "Target yang terakhir adalah kemerdekaan Palestina," pungkasnya. (rm/js)



POLEMIK TAPERA

Menteri PUPR 'Dikuliti' DPR



Jakarta, MIMBAR - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 'dikuliti' anggota DPR RI dalam Rapat Kerja, Rabu (6/6). Mereka mempertanyakan kontribusi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam memenuhi kebutuhan rumah pekerja baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta.



"Selama ini saya belum menemukan data mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan pekerja baik ASN maupun swasta," kata Irine Yusiana Roba Putri dari Fraksi PDI Perjuangan.

Itu juga mempertanyakan sikap pemerintah terutama Basuki ketika ditanya soal Tapera. Menurutnya, Basuki tak pernah memberikan jawaban yang jelas soal Tapera.

"Terus kadangkala ada pemerintah yang bilang ya itu kalo yang mampu untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara yang memberikan subsidi, kalau sesama warga namanya gotong royong," katanya.

"Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan masyarakat yang hadapi, jadi mohon penjelasan

Buruh Bakal Gugat ke MA dan MK

PRESIDEN Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya berencana menggugat aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

■ Bersambung ke Hal 11

■ Bersambung ke Hal 11

RI Akan Terima 127 Hektar Lahan Sawit dari Malaysia

Jakarta, MIMBAR - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan Indonesia bakal menerima 127 hektare lahan sawit dari Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Hal tersebut disampaikan Hadi selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah

Negara di Gedung Tribra, Kamis (6/6).

Hadi mengatakan, penerima lahan tersebut merupakan kesepakatan antara dua negara dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. "Selesai dengan satu kesepakatan bahwa wilayah desa yang masyarakatnya

■ Bersambung ke Hal 11

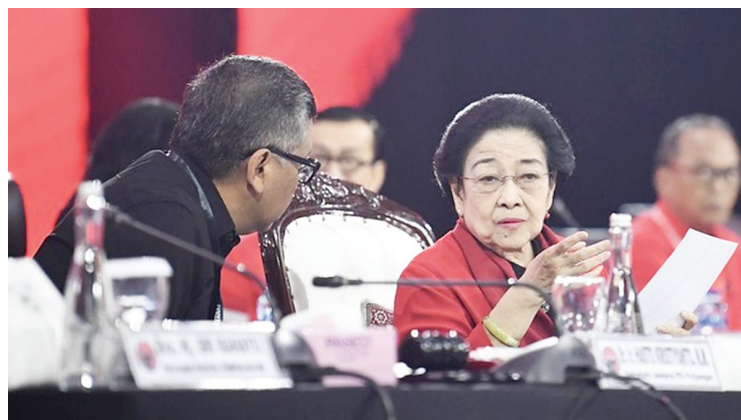
SOAL HASTO DIPERIKSA POLISI

Megawati Ingat Zaman Orba

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan kelakar Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri usai dirinya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks.

Hasto menyebut reaksi ketua umumnya itu disampaikan saat dirinya menjemput Megawati di Bandara selepas kunjungan ke Bali dan Ende, Selasa (4/6).

"Kemarin abis dari Bali, pas saya jemput Ibu, Ibu turun langsung ketawa 'To, kamu merasakan seperti saya di zaman Orde Baru dipanggil polisi'. Wah belum ada apa-apanya yang saya lakukan. Saya tidak seperti itu sama Ibu," ungkap Hasto saat menjadi pembicara di peringatan Bulan Bung Karno, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta (6/6).



Hasto menyebut sejumlah proses yang ia jalani saat ini tak sepadan dengan perjuangan ketua umum partainya dan Bung Karno. Dia menilai hal paling utama bagi dirinya saat ini adalah terus percaya pada kebenaran dan yang ia perjuangkan.

Dia karenanya juga menolak saat ditawari pendampingan oleh ribuan Satgas partai di Polda. Dia merasa cukup hanya ditemani sejumlah orang dekatnya,

termasuk tim kuasa hukum. "Kemarin banyak mau menemani, Pak Komar, mau kerahkan ribuan Satgas. Pada mau datang, tetapi saya bilang enggak usah, nanti malah enggak bagus," kata dia.

"Jadi, kalau saya hanya diintimidasi begitu, masih kecil dibanding perjuangan Bung Karno dan Bu Mega.. Sendiri enggak ada masalah,

■ Bersambung ke Hal 11

KORUPSI TIMAH

KPK Kembali Panggil Bos Tambang Haji Romo

Jakarta, MIMBAR - Direktur Utama (Dirut) PT Nusa Halmahera Mineral, Romo Nitiyudo Wachjo alias Haji Romo kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat
30 ZULKALDAH 1445 H
Subuh : 04:53 WIB Maghrib : 18:37 WIB
Zuhur : 12:27 WIB Isya : 19:51 WIB
Ashar : 15:53 WIB ■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Haji Mabruur

Oleh Dr A Rasyid, MA



HAJI mabrur adalah harapan bagi semua yang tengah menunaikan ibadah haji. Bahkan yang belum sempat menunaikan ibadah hajipun terkadang juga berdoa agar yang berangkat menunaikan ibadah haji memperoleh haji mabrur.

Begitu pentingnya peroleh peringkat mabrur dalam menunaikan ibadah haji. Istilah haji mabrur sebenarnya tidak

■ Bersambung ke Hal 11

Lelucon baru ...
Hehehe..



BURUH TOLAK PEMBERLAKUKAN TAPERA :

Ratusan buruh tersebut berunjuk rasa menolak rencana pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk seluruh pekerja di di Kawasan Patung Kuda Jakarta, Kamis (6/6). Aksi unjuk rasa buruh diikuti sejumlah elemen serikat pekerja di wilayah Jabodetabek, seperti KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia (SPI), serta organisasi perempuan PERCAYA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan iuran dana Tapera itu dapat merugikan dan membebani pekerja. Dana Tapera juga rawan dikorupsi, tidak jelas, dan mekanisme pencairannya rumit.

(Foto Liputan6.com)

MAHFUD MD RESPON PUTUSAN MA

Cara Berhukum Negara Ini Sudah Dirusak

Jakarta, MIMBAR - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 terus menuai kontroversi dan polemik bagi tatanan hukum di negeri ini. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD langsung angkat bicara terkait polemik tersebut. Dia awalnya enggan mengomentari polemik tersebut ketika diujani berbagai pertanyaan oleh netizen dalam akun media X pribadinya. Namun akhirnya, mantan cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu mengeluarkan uneg-uneg-nya. Menurut Mahfud, Peraturan KPU yang oleh MA dinyatakan bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 itu justru memuat materi yang

diambil dari ketentuan Pasal 7 UU 10/2016. Pasal tersebut mengatur, "Saat mencalonkan diri atau dicalonkan Cagub/cawagub harus berusia minimal 30 tahun sedangkan Cabup/cawabup dan cawali/cawawali harus berusia minimal 25 tahun". "Saya kira hakim MA ini tidak baca peraturannya. Mengapa MA memvonis PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 10/2016. Bukankah PKPU itu justru menurun dari isi UU 10/2016. Orang yang belajar ilmu perundang-undangan sedikit saja itu sudah mengerti, bahwa jawabannya itu," ujar Mahfud dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Rabu (5/6). Lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi

(MK) tersebut, akrobat hukum untuk kepentingan politik terus terjadi saat ini. Hal itu terus menimbulkan kebusukan hukum. Masih kata Mahfud, putusan MA itu seakan membatalkan suatu UU. Padahal dalam konstitusi kita, membatalkan UU hanya bisa dilakukan melalui 2 cara yakni legislative review di DPR dan judicial review di MK. "Negara ini cara berhukumnya sudah rusak dan dirusak, biar saja busuk tambah busuk, biar nanti kebusukan itu akan runtuh sendiri suatu saat. Apa yang kau mau lakukan, lakukan saja mumpung anda masih punya posisi untuk melakukan. Tapi suatu saat, kebusukan itu bisa memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama," tandas Mahfud. (rm/js)

Warga Israel...

Dari Halaman 1

Mereka mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan-slogan anti Palestina selama pawai tersebut. Kompleks Masjid Al Aqsa menjadi titik kumpul para warga Israel. Di sana, mereka berjoget, membentangkan bendera, dan menyerang warga Palestina sebagai aksi unjuk rasa. Israel padahal mengerahkan 3.000 personel yang ditugaskan untuk menga-

mankan demonstran hingga mendesak mereka menghindari kekerasan. "Faktanya, yang mereka [polisi] lakukan adalah meminta orang-orang Palestina untuk menutup toko-toko mereka karena mereka tak bisa mengendalikan orang-orang ini," ujar Khan. Pasukan Zionis yang berjaga di Temple Mount atau Kompleks Masjid Al Aqsa kerap mengizinkan warga Israel menyerbu situs itu. (cnni/js)

Megawati Ingat...

Dari Halaman 1

Bung Karno juga sendiri," imbuh Hasto. Hasto tengah menjalani sejumlah proses hukum dalam beberapa waktu terakhir. Usai memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, dia dijadwalkan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap salah satu kadernya, Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto memastikan dirinya akan hadir memen-

uhi panggilan lembaga antirasuah pekan depan. Dia berkelakar dirinya akan kualat jika tak penuhi panggilan tersebut karena KPK didirikan Ketua Umumnya, Megawati saat menjabat presiden. "Kalau dipanggil KPK juga datang, cukup didampingi penasihat hukum. Kan, KPK yang dirikan Bu Mega. Nanti kalau saya enggak datang kualat. Maka datang," katanya. ***



Derajat Manusia

Dari Halaman 1

dikenal dalam Al-Qur'an, tetapi telah disebutkan dalam beberapa riwayat hadits. Di antara hadits tersebut adalah; Artinya: Dari sahabat Jabir bin Abdillah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga." Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa (tanda) mabrurnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Memberikan makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan yang baik." (HR Ahmad, At-Thabrani, dan Al-Baihaqi). Pada hadits tersebut di atas menunjukkan adanya perubahan pada setiap yang telah melaksanakan ibadah haji sebagai sosok yang peduli pada orang lain, dengan memberi makan dan memberi ucapan yang baik-baik. Kemudian pada hadits berikut Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, "Amalan manakah yang lebih utama?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan RasulNya." Lalu beliau ditanya lagi, "Kemudian apakah?" Beliau menjawab, "Jihad fi-sabilillah." Masih ditanya lagi, "Kemudian apakah?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur." (Muttafaq 'alaih). Pada hadits tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya perolehan haji mabrur. Kemudian pada hadits berikutnya Nabi menjelaskan bahwa haji mabrur itu balasan adalah surga, sebagaimana sabdanya, artinya: Dari Abu Hurairah RA pula, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Umrah ke umrah yang

berikutnya adalah menjadi penutup dosa dalam waktu antara dua kali umrah itu, sedang haji mabrur, maka tidak ada balasan bagi yang melakukannya itu melainkan surga." (Muttafaq 'alaih). Pada hadits berikut ini adalah orang yang memperoleh haji mabrur itu seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengerjakan haji, lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan dosa yakni kemaksiatan besar atau yang kecil, maka ia akan kembali dari ibadah hajinya itu sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya yakni tidak ada dosa dalam dirinya sama sekali." (Muttafaq 'alaih). Salah satu syarat untuk meraih haji mabrur adalah dengan meluruskan niat selama melaksanakan ibadah haji. Niat menjadi hal yang paling penting dalam setiap ibadah, baik shalat, puasa, umrah, hingga ibadah haji. Niat juga menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. umat muslim juga perlu memahami rukun haji sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Rukun haji disebut juga sebagai syarat wajib yang harus dilakukan oleh setiap jemaah haji. Selama menunaikan ibadah haji, seyogianya harus khusyuk agar ibadah yang dilakukan bisa mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Untuk mendapatkan khusyuk, perlu mengetahui pemahaman tentang ibadah haji dan kesadaran tentang keagungan Allah SWT. (*)

Buruh Bakal...

Dari Halaman 1

strasi di area sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (6/6). Said meminta DPR juga untuk tidak cuci tangan terhadap kebijakan Tapera. Ia mengatakan DPR terlibat dalam pembentukan UU Tapera. "Semoga DPR dan pemerintahan yang baru, presiden yang baru bisa mendengarkan suara hati rakyat, buruh dan masyarakat, kita tolak pemotongan iuran Tapera," kata Said. Sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi menolak aturan Tapera yang mewajibkan

potongan hingga 3 persen atas penghasilan pekerja se-Indonesia pada hari ini. Selain menolak Tapera, massa juga membawa sejumlah tuntutan lain dalam aksi kali ini. Yakni, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal, menolak KRIS BPJS Kesehatan, dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hingga berita ini ditulis, massa buruh mulai berangsur meninggalkan area sekitar Patung Kuda yang digunakan sebagai lokasi demonstrasi. (cnni/js)

Menteri PUPR...

Dari Halaman 1

"Jadi kalau harus dipotong lagi untuk ini khawatir mengganggu dan ini sudah kelihatan gejala keresahan. Jadi lebih baik yang minat silahkan, jadi dianjurkan saja, tidak diharuskan dulu," katanya. Pemerintah mewajibkan pekerja menjadi peserta Tapera. Kewajiban itu baru saja ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Beleid mengatur bahwa karena aturan itu, pemerintah mewajibkan pengusaha mendaftarkan pekerja menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027. Sebagai konsekuensi atas kepesertaan itu, pekerja harus mengiur sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran; 0,5 persen ditanggung pengusaha sementara 2,5 persen sisanya oleh pekerja. (cnni/js)

RI Akan...

Dari Halaman 1

kelapa sawit kepada Indonesia. Hadi mengatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada pemerintah daerah. Lewat izin HPL tersebut, kata dia, diharapkan lahan 127 Hektar kebun kelapa sawit itu dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus

untuk membayar ganti rugi terhadap warga yang harus direlokasi. "Nanti akan saya koordinasi dengan Bupati, kita akan HPL-kan dan kita serahkan ke Bupati untuk dikelola. Supaya bisa mendapatkan untung untuk membantu pembayaran masyarakat yang kurang lebih Rp50 miliar," kata mantan Panglima TNI tersebut. (cnni/js)

KPK Kembali...

Dari Halaman 1

pada Pengadilan Negeri Ternate. AGK didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan 60 ribu Dolar AS, disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan 30 ribu Dolar AS. Sebelumnya, sebanyak 4 orang pihak pemberi suap telah terlebih dahulu menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate pada Rabu (6/3). Keempatnya adalah, Stevi Thomas (ST) selaku swasta, Kristian Wuisan (KW) selaku swasta, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dan Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Maluku. Dalam surat dakwaan, Stevi Thomas C selaku Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Tbk telah memberi uang secara bertahap sebesar 60 ribu dolar AS kepada AGK, agar dapat dimudahkan dalam penerbitan izin dan rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Maluku yang berada di bawah strukturnya, serta terkait izin dan rekomendasi teknis yang diajukan oleh perusahaan di bawah Harita Group. Sedangkan terdakwa Kristian Wuisan alias Kian selaku Direktur Utama PT Birinda Perksa Jaya (BPJ), telah memberikan uang secara bertahap sebesar Rp3,505 miliar kepada AGK karena telah memberikan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov Maluku sejak 2020-2023.

SANDRA DEWI TERSANGKA Viral potongan video di media sosial berisi aktivitas istri tersangka kasus korupsi timah Harvey Moies, Sandra Dewi yang dinarasikan menjadi tersangka kasus yang sama. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Sandra Dewi, Haris Arthur Hedar membantah kabar tersebut. "Tidak ada itu, kan sudah dipertegas pak Kapuspenkum (Ketut Sumedana) tidak ada itu. Itu berita hoaks, fitnah yang dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab," ujar Haris dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (6/6). Meski begitu, Haris mengaku tidak ambil pusing dengan rumor Sandra Dewi tersangka. "Kita harus bisa membedakan posisi dia sebagai Sandra Dewi dan posisi sebagai istri daripada HM. Jadi tidak ada perlu mengambil langkah hukum, ini kan statusnya saksi," kata Haris. Sebagai informasi, kabar Sandra Dewi jadi tersangka di kasus timah viral di media sosial X atau Twitter. Seperti video yang diunggah akun @opposite6892, Sandra terlihat mengenakan baju hitam saat keluar dari gedung Kejagung dan diduga sedang menuju mobil. Di sisi lain, Kejagung juga memastikan Sandra Dewi sampai saat ini belum menjadi tersangka. "Sampai saat ini status yang bersangkutan sebagai saksi," kata Ketut. (rm/js)